

**EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS  
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
GOWA**

**SKRIPSI**

*Di Ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Pada Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Makassar*

**ANDI NURUL AZIZAH  
1293142079**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
2016**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : Andi Nurul Azizah  
 NIM : 1293142079  
 Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 13 September 1994  
 Program Studi : Manajemen  
 Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
 Judul Skripsi : Evaluasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah  
 Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan  
 Informatika Kabupaten Gowa

Dengan Dosen Pembimbing masing-masing :

1. Prof. Dr. Anwar Ramli, SE., M.Si
2. Dr. Anwar Rauf, SE., M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, dan bebas dari unsur ciplakan/plagiat. Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku..


Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen

Yang Membuat Pernyataan



**Dr. Romansyah Sahabuddin, SE., M.Si**  
 NIP. 19630715 19881 1 001




**Andi Nurul Azizah**  
 NIM. 1293142079

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh Andi Nurul Azizah dengan Nomor Induk Mahasiswa 1293142079, berjudul Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa, berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 5075/UN 36.22/PL/2016 tanggal 10 Juli 2016 untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Universitas Negeri Makassar pada hari Selasa, 16 Agustus 2016.

Disahkan oleh :  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Makassar

  
**Dr. H. Muhammad Azis, M.Si**  
NIP. 19591231 198601 1 005

#### Panitia Ujian :

- |                  |                                       |         |
|------------------|---------------------------------------|---------|
| 1. Ketua         | : Dr. H. Muhammad Azis, M.Si          | (.....) |
| 2. WakilKetua    | : Sahade, S.Pd., M.Pd                 | (.....) |
| 3. Sekretaris    | : Muh. Ichwan Musa, SE., M.Si         | (.....) |
| 4. Pembimbing I  | : Prof. Dr. Anwar Ramli, SE., M.Si    | (.....) |
| 5. Pembimbing II | : Dr. Anwar Rauf, S.E., M.Si          | (.....) |
| 6. Penguji I     | : Dr. Romansyah Sahabuddin, SE., M.Si | (.....) |
| 7. Penguji II    | : Drs. Muhammad Djufri, S.Pd., M.Pd   | (.....) |

## MOTTO

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan  
[ Al-'Alaq ]

Menuntut ilmu adalah Taqwa  
Menyampaikan ilmu adalah Ibadah  
Mengulang-ulang adalah Dzikir  
Mencari ilmu adalah Jihad  
(Imam Al-Ghazali)

*Sesungguhnya ALLAH Murka, Marah kepada setiap orang yang berilmu tentang Dunia,  
bodoh tentang Akhirat.  
[HR. Abu Daud, Ibnu Hibban dan Baiqi]*

Perjumpaan dengan manusia tidak berfaedah apa-apa  
Selain kesia-siaan dan omong kosong belaka  
Maka sedikitlah berjumpa dengan manusia  
Kecuali bertemu dengan guru untuk mengambil ilmunya  
Atau bertemu mursyid untuk memperbaiki jiwa  
(Syaiikh Humaidi)

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan  
kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-  
benar beserta orang-orang yang berbuat baik.  
[ Al-Ankaboot:69 ]

## ABSTRAK

**Andi Nurul Azizah, 2016.** Evaluasi Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar. Di bimbing oleh **Anwar Ramli** dan **Anwar Rauf**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa. Variabel penelitian yang dilakukan adalah variabel tunggal yaitu Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data *time series* pada tahun 2011-2015. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *mean normal deviation* (MND) dan *mean absolute persen error* (MAPE).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa selama lima tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan hasil yang positif, yang berarti bahwa Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

***Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya dan senantiasa memberikan kemudahan disetiap kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Salam tetap tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang setia mendampingi dan orang-orang yang hingga saat ini masih setia pada ajaran-Nya.

Skripsi ini berjudul “Evaluasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa”. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. BAB II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pikir, dan Hipotesis. BAB III Metode Penelitian terdiri atas Variabel dan Desain Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data. BAB IV Hasil Penelitian terdiri atas Hasil Penelitian dan Pembahasan. BAB V Kesimpulan dan Saran terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.

Tidak ada kesempurnaan yang tercipta di muka bumi ini begitu pula dengan penulis yang lahir dengan penuh keterbatasan sehingga penulis sadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan

saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami, namun berkat dorongan dan do'a dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Anwar Ramli SE., M.Si sebagai penasehat akademik sekaligus pembimbing I yang dengan segala kesabaran, tenaga, waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Anwar Rauf SE., M.Si sebagai pembimbing II yang dengan ikhlas bersedia meluangkan waktu, kesabaran, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Romansyah Sahabuddin SE., M.Si , Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan arahan dan saran dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi.
4. Penguji I bapak Dr. Romansyah Sahabuddin SE., M.Si dan Penguji II bapak Drs. H. Muhammad Djufri, M.Pd yang telah bersedia memberikan tanggapan, kritik dan saran kepada penulis sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Widhi Nugraha, SE sebagai moderator yang telah bersedia memberikan saran dan selalu menolong selama proses penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Aziz, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dan para Pembantu Dekan, serta seluruh Staf Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kemudahan dalam rangka penyelesaian studi dan penyusunan skripsi.
8. Bapak Prof. Dr. H. Husain Syam, M .TP. Rektor Universitas Negeri Makassar beserta jajarannya atas segala fasilitas perkuliahan yang menunjang sahingga penulis bisa menyelesaikan studi di universitas.
9. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa, Bapak Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana beserta staf, Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan beserta staf, Bapak Kepala Sub Bagian Kepegawaian beserta staf, dan Bapak Kepala Sub Bagian Keuangan beserta staf, serta seluruh pegawai Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Gowa yang telah banyak membantu penulis selama penelitian ini berlangsung.
10. Kedua Orang tuaku tercinta, yang selalu menjadi penyemangat terhebat terima kasih banyak atas segala do'a, kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan nasehat kalian selama ini. Semoga semuanya bernilai amal jariyah di sisi Allah SWT. Aamiin.



11. Saudara-saudaraku, Andi Hasriawan SH, Andi Rezky Haryadi, Fadhila Rezky dan Andi Muhammad Yusuf, terima kasih banyak untuk susah senang, hiburan, dukungan dan bantuannya selama ini.
12. Perempuan-perempuan Sholehahku. Widya Erika, Ayu Adrianty, Khairunnisa Halim, Irma Kusuma Wardhani SE, Yuninda Basir Amd.keb, dan Nurfitriani Bachrun. Terima kasih untuk semua do'a, dukungan, kasih sayang, ilmu, pengalaman, susah senang selalu ada dan tetap menjadi sahabat yang terbaik.
13. Sahabat-sahabatku, Rika Yunus SE, Nurafiah Nita SE, dan Nurwafiah Nurdin SE, yang selalu menemani dan mensupport selama kurang lebih empat tahun ini dan bersedia menjadi tempat mengeluh dan berbagi selama proses penyusunan skripsi.
14. Terkhusus Aswar H. Thamrin SE, yang selalu sabar menemani suka duka selama beberapa tahun terakhir. Dan yang selalu menyemangati serta memotivasi selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih banyak untuk seluruh pengorbanannya.
15. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Manajemen khususnya angkatan 2012. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kenangan indah yang takkan terlupakan.
16. Teman-teman KKN di Mangallekana-Pangkep. Terima kasih atas kebersamaan yang indah dan pengalaman yang takkan terlupakan meskipun singkat.
17. Bagi semua orang yang penulis kenal yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan dukungannya.

Akhirnya harapan dan doa penulis semoga mendapat ridho dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, serta bernilai ibadah di sisi-Nya Insya Allah Aamiin Ya Rabbal Alaamiin dan semoga kesalahan atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini semakin memotivasi penulis dalam belajar dan semoga berguna bagi pembaca yang budiman.

Makassar, Agustus 2016

Andi Nurul Azizah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	7
B. Kerangka Pikir.....	23

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian.....	25
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	27
C. Populasi dan Sampel.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	29

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Hasil Analisis Data.....	63
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
---------------------	----

LAMPIRAN.....	81
---------------	----

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Data Target dan Realisasi <i>Pendapatan Asli Daerah</i> pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015.....	3
2.	Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.....	20
3.	Realisasi dan Target Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015.....	58
4.	Realisasi dan Target Retribusi MCK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015.....	58
5.	Realisasi dan Target Retribusi Kios Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015.....	59
6.	Realisasi dan Target Retribusi PKB Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015.....	60
7.	Realisasi dan Target Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015.....	61
8.	Realisasi dan Target Pajak Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015.....	61
9.	Realisasi dan Target Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015.....	62
10.	Perhitungan <i>Mean Normal Deviation</i> Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	64
11.	Perhitungan <i>Mean Normal Deviation</i> Retribusi MCK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	64
12.	Perhitungan <i>Mean Normal Deviation</i> Retribusi Kios Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	65
13.	Perhitungan <i>Mean Normal Deviation</i> Retribusi PKB Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	66

14.	Perhitungan <i>Mean Absolute Deviation</i> Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	66
15.	Perhitungan <i>Mean Normal Deviation</i> Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	67
16.	Perhitungan <i>Mean Absolute Persen Error</i> Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	68
17.	Perhitungan <i>Mean Absolute Persen Error</i> Retribusi MCK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	68
18.	Perhitungan <i>Mean Absolute Persen Error</i> Retribusi Kios Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	69
19.	Perhitungan <i>Mean Absolute Persen Error</i> Retribusi PKB Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	70
20.	Perhitungan <i>Mean Absolute Persen Error</i> Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	70
21.	Perhitungan <i>Mean Absolute Persen Error</i> Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015 .....	71
22.	Rekapitulasi Penyimpangan Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa .....	73

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Skema Kerangka Pikir.....	24
2.	Skema Desain Penelitian.....	26

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.....	82
2.	Laporan Penerimaan / Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa Tahun 2011-2015.....	85
3.	Mengukur Kesalahan Peramalan Retribusi Terminal 2011-2015.....	90
4.	Mengukur Kesalahan Peramalan Retribusi MCK 2012-2015.....	100
5.	Mengukur Kesalahan Peramalan Retribusi Kios 2012-2015.....	108
6.	Mengukur Kesalahan Peramalan Retribusi PKB 2011-2015.....	116
7.	Mengukur Kesalahan Peramalan Retribusi Parkir 2011-2015.....	126
8.	Mengukur Kesalahan Peramalan Pajak Parkir 2011-2015.....	136
9.	Mengukur Kesalahan Peramalan Retribusi Izin Trayek 2011-2015.....	137
10.	Usulan Judul.....	147
11.	Persetujuan Judul dan Calon Pembimbing.....	148
12.	Halaman Pengesahan Proposal.....	149
13.	Surat Balasan Izin Melaksanakan Pra Penelitian.....	150
14.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian.....	151
15.	Surat Balasan Melaksanakan Penelitian.....	153
16.	Riwayat Hidup.....	154



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada Januari 2001, gema otonomi daerah semakin gencar baik merupakan retorika elit politik maupun pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Otonomi memberikan kebebasan pada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota untuk mengatur dirinya sendiri.

Meningkatkan daerah pada derajat ekonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi. *Self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi. Artinya daerah otonomi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai, membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan/bantuan.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Perlu dipahami masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dimana untuk mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi Daerah.

Sebagai gambaran awal Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa melalui laporan keuangannya memperlihatkan perkembangan *Pendapatan Asli Daerah* (PAD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1 Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
2011	610.072.000,00	685.460.500,00	112,36
2012	624.412.000,00	856.692.000,00	137,19
2013	854.640.000,00	868.357.500,00	101,61
2014	849.640.000,00	882.168.500,00	103,83
2015	849.640.000,00	870.693.000,00	102,48

Sumber : Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan nilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa tahun 2011-2015 tidak konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat kita lihat pada tahun 2011-2013, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan retribusi mandi cuci kakus (MCK) dan retribusi kios. Namun di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tidak terjadi kenaikan target, karena pertimbangan dari data capaian realisasi wajib uji kendaraan Kabupaten Gowa ditahun 2013.

Data Laporan Penerimaan / Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan, bahwa realisasi selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target, hal ini disebabkan karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri tidak dapat diprediksi atau selalu mengalami fluktuasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun kelebihan dari capaian realisasi tersebut, dicapai dari beberapa retribusi seperti retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) yaitu kendaraan dari luar Kabupaten Gowa yang melaksanakan numpang uji atau uji kendaraan di Kabupaten Gowa. Karena target itu sendiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Kemudian target disepakati berdasarkan beberapa pertimbangan dan dilihat dari data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun sebelumnya.

Selain itu dari data Laporan Penerimaan / Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlihat pula adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan karena *izin kir (Keur)* pada Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) hanya ada di Kabupaten Gowa dan di beberapa daerah tertentu. Sedangkan realisasi pada tahun 2015 mengalami penurunan, disebabkan karena meningkatnya kendaraan pribadi yang mengakibatkan kurangnya angkutan umum beroperasi, selain itu juga banyaknya kendaraan yang rusak dan atau juga pindah daerah. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Pemerintah Daerah Kab. Gowa. Namun permasalahannya seberapa besar komponen didalamnya (seperti: retribusi terminal, retribusi mck, retribusi kios, retribusi

pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, pajak parkir, retribusi izin trayek) dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Selama lima tahun terlihat adanya kecenderungan target yang selalu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi. Dapat diartikan bahwa target tidak mengacu pada realisasi di tahun sebelumnya. Kecenderungan ini menjadi satu gambaran bahwa apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa sudah optimal atau masih perlu di evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian : *“Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penyimpangan *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* Pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa”.

## **C. Tujuan Hasil Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.

**D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Diharapkan akan dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa, dalam upaya memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, sekaligus berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan bagi daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan atau pemasukan yang didapatkan oleh daerah yang bersumber dari sumber daya-sumber daya daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Adapun menurut Nurcholis (2007:182), Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Sedangkan menurut Halim (2001:96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, yaitu:

##### **a. Pajak Daerah**

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Sedangkan menurut siagin adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pembiayaan daerah sebagai badan hukum publik. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah yaitu:

- 1) Pajak daerah dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Menurut (Riwu, 2005:171) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengeyam jasa yang disediakan daerah

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui



anggaran pembelanjaan daerah (APBD) dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Secara umum pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti sudah dijelaskan di atas, kemudian yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan terakhir adalah pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi yang ada.

Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Di satu sisi peningkatan pendapatan daerah akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi di sisi lain juga berarti meningkatkan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah jika dilihat dari penggunaannya, terdiri atas:

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas :
  - 1) Pendapatan Asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain
  - 2) Bagian dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)
  - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah

- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- 2) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
- 5) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## 2. Retribusi

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. Sementara itu dalam undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Disebutkan bahwa pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi, yang membedakan adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- b. Pungutan dapat dipaksakan;
- c. Pemungutan dilakukan oleh negara;
- d. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum
- e. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan obyek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah

daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam 3 golongan, yaitu Jasa umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu.

### **1) Retribusi Jasa Umum**

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi pengganti biaya cetak kartu penduduk dan akte catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi pengujian kapal perikanan

### **2) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi penyediaan kakus
- h) Retribusi rumah potong hewan
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k) Retribusi penyebrangan diatas air
- l) Retribusi pengolahan limbah cair
- m) Retribusi penjualan produk usaha daerah

### **3) Retribusi Perizinan**

Retribusi perizinan ialah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan
- c) Retribusi izin gangguan

d) Retribusi izin trayek

### **3. Retribusi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa**

Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa berdasarkan Peraturan Pemerintah Kab. Gowa meliputi:

#### **a. Retribusi Terminal**

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Adapun Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di lingkungan terminal.

#### **b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan serta memenuhi ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.

Adapun Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pengujian kendaraan bermotor.

#### **c. Retribusi Pajak Parkir**

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Adapun Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek Retribusi Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

#### **d. Retribusi Izin Trayek**

Izin trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah operasi. Dengan nama izin trayek di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.



Adapun Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Sedangkan subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari pemerintah

**e. Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat khusus parkir.

**f. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum**

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.

Adapun dasar-dasar Hukum Retribusi Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa diatur dalam :

- (1) UU No.19 Tahun 2011 Tentang retribusi terminal
- (2) UU No.04 Tahun 2012 Tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (3) UU No.12 Tahun 2012 Tentang retribusi pajak parkir

- (4) UU No.18 Tahun 2011 Tentang retribusi izin trayek
- (5) UU No.13 Tahun 2012 Tentang retribusi tempat khusus parkir
- (6) UU No.09 Tahun 2012 Tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

#### **4. Evaluasi**

##### **a. Pengertian Evaluasi**

Secara umum evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Sedangkan menurut Yunanda (2009) evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

##### **b. Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah**

Optimalisasi pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah maupun mengembangkan potensinya terdapat dua alat yakni: perencanaan kebijakan dan upaya administratif. Perencanaan kebijakan adalah langkah-langkah pemerintah daerah dengan mengandalkan kebijakan yang berupa penerbitan ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang bersifat kebijakan menyangkut beberapa masalah pokok yakni: obyek pajak, subyek pajak dan tarif pajak. Dalam hal obyek pajak maka pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah daerah menetapkan apa saja yang akan diperbaiki baik pajak yang berbasis transaksi maupun pajak yang berbasis kebendaan. Subyek pajak yang

ditetapkan dalam peraturan pemerintah daerah akan menentukan siapa saja yang akan dipajaki baik sebagai pembayar pajak, pemungut pajak, maupun entitas yang diminta membantu pemerintah daerah untuk mengumpulkan pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase tertentu atau dapat juga jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar. Dengan demikian pemerintah daerah hendaknya harus berhati-hati dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, jangan sampai mendapat tanggapan yang negatif dari masyarakatnya. Jadi keberhasilan otonomi suatu daerah terutama dalam hal mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergantung pada kejelian aparatur daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki serta kualitas anggota legeslatif yang mengawasi jalannya pemerintahan.

**c. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa**

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan melakukan penegakan peraturan terkait pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pengawasan terkait dengan retribusi-retribusi pendapatan asli daerah. Dan memberikan insentif bagi pegawai yang melaksanakan pemungutan retribusi-retribusi daerah dengan baik dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam proses administrasi. Kemudian membuat kebijakan daerah yang tidak memberatkan bagi para pelaku usaha dengan mempertimbangkan biaya retribusi atau waktu pemungutan retribusi secara bijak. Upaya selanjutnya yaitu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi agar masyarakat dapat lebih taat untuk membayar retribusi-retribusi daerah. Serta meningkatkan kualitas pelayanan

pemungutan retribusi-retribusi daerah guna memudahkan masyarakat dalam membayar iuran retribusi-retribusi daerah.

**Tabel 2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah**

No.	Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
1.	Penegakan peraturan terkait pelaksanaan pajak dan retribusi daerah
2.	Memberikan insentif bagi pegawai dan kemudahan bagi para pelaku usaha
3.	Membuat kebijakan daerah yang tidak memberatkan bagi para pelaku usaha
4.	Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah
5.	Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat

Sumber : Staf keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (Data diolah, 2016)

## 5. Budgeting (Anggaran)

Menurut Munandar (2015:1) *Budget* (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan/instansi, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan *Budgeting* adalah proses kegiatan yang menghasilkan sebuah *Budget* sebagai keluaran (*output*), serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi *Budget* yang terdiri dari fungsi pemberian pedoman kerja, fungsi pengkoordinasian kerja, dan fungsi evaluasi (pengawasan) kerja.

Budget Penaksiran (*Forecasting Budget*) adalah Budget yang memuat seluruh taksiran-taksiran (*forecast*), baik taksiran tentang kegiatan-kegiatan

perusahaan/instansi dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang, maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan/instansi pada suatu saat tertentu yang akan datang. Budget Penaksiran terdiri dari dua kelompok, yaitu Budget Operasional dan Budget Keuangan. Budget Operasional ialah budget yang memuat taksiran-taksiran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Sedangkan Budget Keuangan ialah budget yang memuat taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan/instansi pada suatu saat tertentu yang akan datang. Munandar (2015:21).

Budgeting (Anggaran) dalam sektor Pemerintahan merupakan suatu hasil akhir proses penyusunan rencana kerja dan atau rencana operasi keuangan, yang mencakup pengeluaran yang diusulkan dalam periode waktu tertentu atau dalam satu atau beberapa tahun yang berupa komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Kemudian anggaran tersebut diteleah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Budgeting (Anggaran) kemudian dapat kita Proyeksi (Ramalkan) dengan menggunakan Teknik Proyeksi Bisnis (Forecast Budgeting) yaitu dengan metode pengukuran kesalahan peramalan.

#### **6. Teknik Proyeksi Bisnis Menggunakan Metode Pengukuran Kesalahan Peramalan**

Menurut Gitosudarmo dan Najmudin (2008:1) Teknik Proyeksi Bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan (perkiraan) mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Proyeksi (*forecast*) menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana di antaranya didasarkan pada suatu

proyeksi atau *forecast* untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian di masa yang akan datang. Adapun pemilihan teknik peramalan yang digunakan dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu pola atau karakteristik data, jangka waktu, biaya dan tingkat akurasi yang diinginkan.

Metode Pengukuran Kesalahan Peramalan merupakan perhitungan yang dapat digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, juga untuk mengawasi peramalan dan untuk memastikan peramalan berjalan dengan baik. Tiga dari perhitungan tersebut antara lain:

a. Mean Normal Deviation (MND)

Metode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan-kesalahan yang absolut. Mean Normal Deviation (MND) mengukur ketepatan peramalan dengan rata-rata kesalahan dugaan (nilai normalitas masing-masing kesalahan). Mean Normal Deviation (MND) berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli.

b. Mean Absolute Percen Error (MAPE)

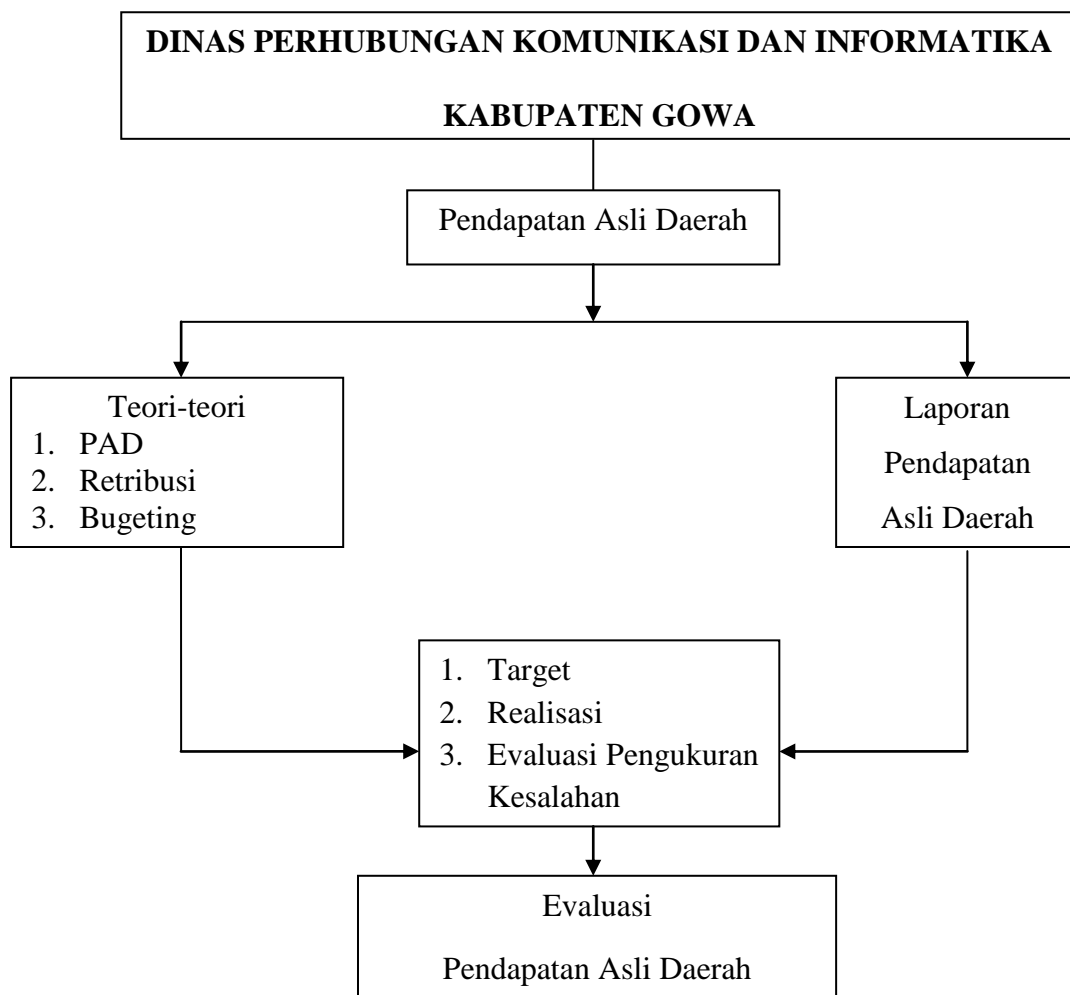
Mean Absolute Percen Error (MAPE) dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu. Kemudian, rata-rata kesalahan persentase absolut tersebut. Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. MAPE mengindikasikan seberapa besar kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai nyata.

## **B. Kerangka Pikir**

Evaluasi Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Pendapatan Asli Daerah instansi tersebut yang tercermin dari data laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari aktivitas tahun ke tahun. Realisasi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dapat diartikan sebagai prestasi instansi dalam mengelolah sumber daya keuangan didalam Pendapatan Asli Daerahnya.

Gambaran mengenai laporan Pendapatan Asli Daerah suatu instansi dapat diperoleh dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan tersebut bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi. Penilaian perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa dapat dilakukan dengan cara mengoptimalisasi laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah instansi selama periode waktu tertentu. Kemudian pengukuran laporan keuangan yang dilakukan oleh instansi adalah dengan menggunakan pengukuran kesalahan peramalan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dari teori yang telah dibahas, maka dapat disusun kerangka pikir yang menggambarkan tentang evaluasi laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan metode pengukuran kesalahan peramalan.



**Gambar 1. Skema Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Variabel dan Desain Penelitian**

##### **1. Variabel Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini digunakan variabel tunggal. Variabel tersebut yaitu laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.

##### **2. Desain Penelitian**

Penyusunan desain penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian. Selain itu diharapkan peneliti dapat lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Desain penelitian berisi tentang langkah-langkah kegiatan mulai tahap persiapan sampai tahap penulisan dan pelaporan hasil penelitian yang diperoleh.

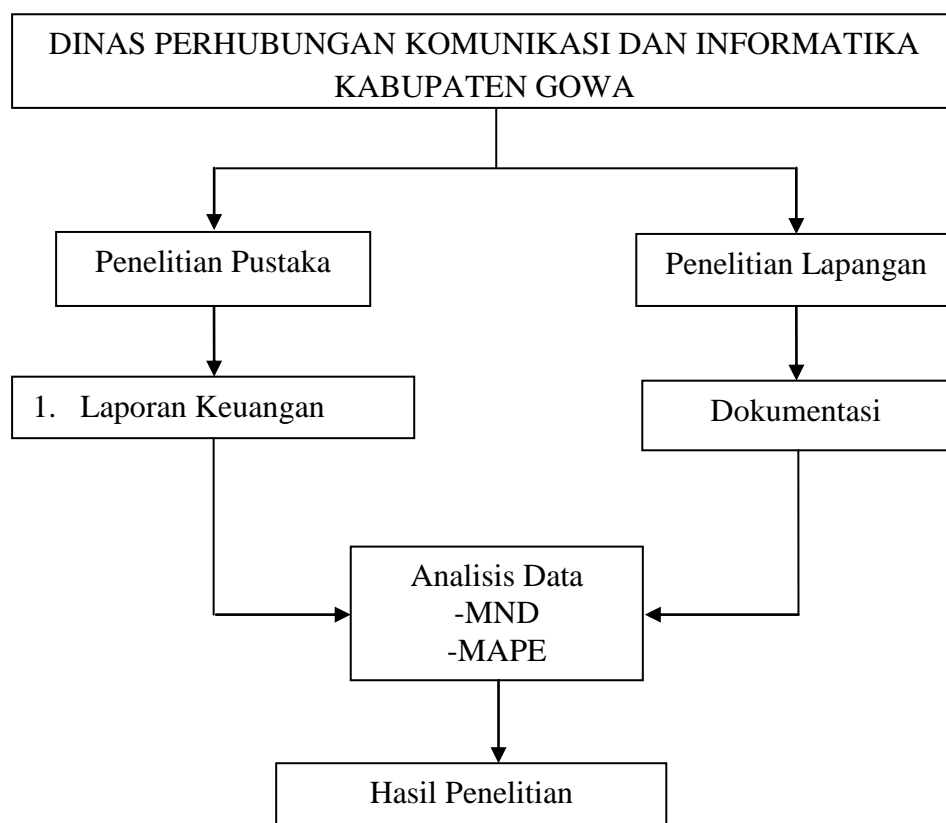
Adapun desain penelitian atau langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Menyiapkan perencanaan-perencanaan yang memuat, bagaimana memilih masalah yang hendak diteliti serta membaca buku-buku yang terkait dalam masalah yang diangkat.
- b. Melakukan studi pendahuluan yang dilakukan dengan meninjau lokasi penelitian atau biasa disebut pra penelitian.
- c. Menyiapkan laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten

Gowa dari tahun 2011-2015, yang terdiri dari retribusi terminal, retribusi mandi cuci kakus, retribusi kios, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, pajak parkir, retribusi izin trayek.

- d. Data laporan keuangan tersebut selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan metode pengukuran kesalahan peramalan.
- e. Menyusun laporan hasil penelitian yang telah dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

Untuk lebih jelasnya, maka desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. Skema Desain Penelitian**

## **B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

### **1. Definisi Operasional**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap arti dan istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan. Operasionalisasi ini merupakan batasan pengertian dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Laporan target dan realisasi pendapatan asli daerah merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa dalam periode tertentu yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa Laporan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa telah melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa secara baik dan benar.
- b. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.
- c. Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk di capai.

- d. Realisasi adalah pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi nyata. Realisasi juga merupakan tindakan nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan.

## **2. Pengukuran Variabel**

Pengukuran variabel dilakukan sesuai dengan data laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa .

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah data laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun (2011-2015) pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa.

### **2. Sampel**

Adapun sampel dari penelitian ini adalah data laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa periode tahun 2011 - 2015 khususnya retribusi terminal, retribusi mandi cuci kakus, retribusi kios, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, pajak parkir, retribusi izin trayek.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan informasi sehubungan dengan penelitian skripsi ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan

realisasi dan target pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa periode tahun 2011-2015.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Rancangan analisis data yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah cara untuk merumuskan dan menafsirkan data sehingga memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan instansi melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data tentang masalah yang ada. Data yang sudah ada dan terkumpul dianalisis dengan menggunakan peralatan analisis yaitu Metode Pengukuran Kesalahan Peramalan (Heizer dan Render, 2014:104) adalah sebagai berikut :

$$MND = \frac{\sum_{i=1}^n | \text{Aktual} - \text{Peramalan} |}{n}$$

$$MAPE = \frac{\sum_{i=1}^n 100 | \text{Aktual}_i - \text{Aktual}_{i-1} | / \text{Aktual}_i}{n}$$

Adapun Kriteria Pengukuran Kesalahan Peramalan di bagi menjadi dua kategori, yaitu:

(+) Berhasil

Penyimpangan positif menandakan bahwa retribusi pendapatan asli daerah dinyatakan berhasil. Artinya bahwa Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

(-) Gagal

Penyimpangan negatif menandakan bahwa retribusi pendapatan asli daerah dinyatakan gagal. Artinya bahwa Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa belum mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

Dimana :

n = Pengamatan/ Periode waktu

MND = Mean Normal Divition

MAPE = Mean Absolute Percen Error

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Gowa**

Berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 8 Tahun 1995 Kabupaten Gowa ditunjuk sebagai salah satu daerah Tingkat II percontohan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No. 22 Tahun 1990, Tentang penyerahan sebagian urusan dalam bidang Lalu lintas dan angkutan jalan kepada daerah Tingkat II.

Konsekuensi dari peraturan RI No. 22 Tahun 1990 dan No. 8 Tahun 1995, maka dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Selanjutnya berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 03 Tahun 2001 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Gowa.

Pada Tahun 2008, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa berubah lagi menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7), sesuai bagan terlampir.

Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa adalah penggabungan 2 unit kerja Pemerintahan Kabupaten Gowa. Dengan berubahnya

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa, maka Kantor Informasi dan Komunikasi (Infokom) dihapus dan disebagikan besar urusan/kegiatan Kantor Infokom masuk kedalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa dan sebahagian lagi bergabung dengan unit kerja yang terkait.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 terdiri dari :

### **a. Kepala Dinas**

Abd. Kadir, SH, MM

### **b. Sekretaris**

-

#### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Andi Arifuddin. B, SE

#### **2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Inda Swari Tamare, S.sos

#### **3) Sub Bagian Keuangan**

Muh. Nasir, SE, MM

### **c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Fery W. St, MT

#### **- Seksi Lalu Lintas**

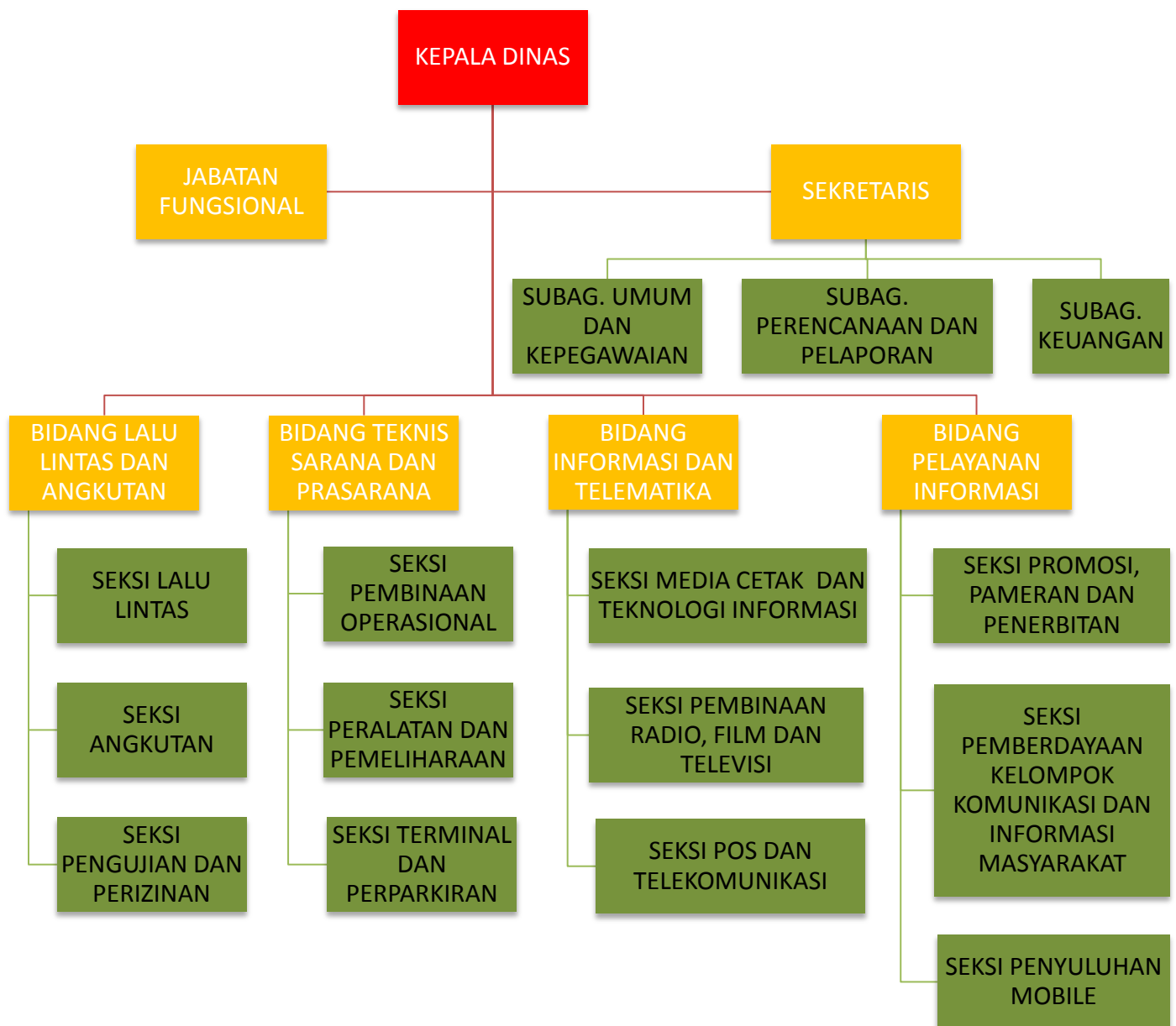
Muh. Rizal, ST

#### **- Seksi Angkutan**

Abd. Haris, SH



- **Seksi Pengujian dan Perizinan**  
Ahmad Yani, SH
- d. **Bidang Teknis Sarana dan Prasarana**  
Ir. S a h a d a t
- **Seksi Pembinaan dan Operasional**  
Yuyun Nur Hikmah, S.Kom
- **Seksi Peralatan dan Pemeliharaan**  
H. Syarifuddin. T, SE
- **Seksi Terminal dan Perparkiran**  
Lahuddin, S.Sos
- e. **Bidang Informasi dan Telematika**  
Drs.H.M. Arifin
- **Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi**  
Burhanuddin Nas, S.Sos
- **Seksi Pembinaan Radio, Film dan Televisi**  
A.M. Najib Qasyim, S.Sos
- **Seksi Pos dan Telekomunikasi**  
Agus Komar Wijaya
- f. **Bidang Pelayanan Informasi**  
Wahidah. AR, S.Sos
- **Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan**  
Hj. Sri Mulyanti. M, SH
- **Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat**  
Ruslan Rappung, SE
- **Seksi Penyuluhan Mobile**  
Sahabuddin, S.Sos



Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

## 1. Tugas Pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) maka Tugas dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

**Tugas Pokok :**

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas di atas, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dinas;
- b. Perumusan rencana strategik dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat**

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan

**Tugas Pokok :**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Tugas Pokok :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

#### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.

### **2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

#### **Tugas Pokok :**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi

petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.

**3) Sub Bagian Keuangan**

**Tugas Pokok :**

Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Keuangan;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian Keuangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian Keuangan.

**c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas
- b. Seksi Angkutan
- c. Seksi Pengujian dan Perizinan

**Tugas Pokok :**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan meliputi Seksi Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian dan Perizinan.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

**1) Seksi Lalu Lintas**

**Tugas Pokok :**

Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Lalu Lintas.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Lalu Lintas;



- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Lalu Lintas;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Lalu Lintas;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Lalu Lintas.

## **2) Seksi Angkutan**

### **Tugas Pokok :**

Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Angkutan.

### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Angkutan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Lalu Lintas;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Angkutan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Angkutan.

## **3) Seksi Pengujian dan Perizinan**

**Tugas Pokok :**

Seksi Pengujian dan Perizinan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pengujian dan Perizinan .

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengujian dan Perizinan ;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengujian dan Perizinan ;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengujian dan Perizinan ;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengujian dan Perizinan.

**d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana**

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Operasional
- b. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan
- c. Seksi Terminal dan Perparkiran

**Tugas Pokok :**

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Teknis Sarana dan Prasarana meliputi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan serta Terminal dan Perparkiran.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Teknis Sarana dan Prasarana.

**1) Seksi Pembinaan Operasional**

**Tugas Pokok :**

Seksi Pembinaan Operasional dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk,

memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pembinaan Operasional.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Operasional;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Operasional;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pembinaan Operasional ;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pembinaan Operasional.

**2) Seksi Peralatan dan Pemeliharaan**

**Tugas Pokok :**

Seksi Peralatan dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Peralatan dan Pemeliharaan.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Peralatan dan Pemeliharaan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Peralatan dan Pemeliharaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Peralatan dan Pemeliharaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Peralatan dan Pemeliharaan.

### **3) Seksi Terminal dan Perparkiran**

#### **Tugas Pokok :**

Seksi Terminal dan Perparkiran dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Terminal dan Perparkiran.

#### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Terminal dan Perparkiran;

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Terminal dan Perparkiran;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Terminal dan Perparkiran;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Terminal dan Perparkiran.

**e. Bidang Informasi dan Telematika**

Bidang Informasi dan Telematika terdiri dari :

- a. Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi
- b. Seksi Pembinaan Radio, Film dan Televisi
- c. Seksi Pos dan Telekomunikasi

**Tugas Pokok :**

Bidang Informasi dan Telematika dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Informasi dan Telematika meliputi Media Cetak dan Teknologi Informasi, Pembinaan Radio, Film dan Televisi serta Pos dan Telekomunikasi.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Informasi dan Telematika;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Informasi dan Telematika;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Informasi dan Telematika;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Informasi dan Telematika.

#### **1) Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi**

##### **Tugas Pokok :**

Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi.

##### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi

## **2) Seksi Pembinaan Radio, Film dan Televisi**

### **Tugas Pokok :**

Seksi Pembinaan Radio Film dan Televisi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberitugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pembinaan Radio Film dan Televisi.

### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Radio Film dan Televisi;



- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Radio Film dan Televisi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi

### **3) Seksi Pos dan Telekomunikasi**

#### **Tugas Pokok :**

Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pos dan Telekomunikasi.

#### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pos dan Telekomunikasi ;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pos dan Telekomunikasi.

**f. Bidang Pelayanan Informasi**

Bidang Pelayanan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan
- b. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat
- c. Seksi Penyuluhan Mobile

**Tugas Pokok :**

Bidang Pelayanan Informasi dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Pelayanan Informasi meliputi Promosi, Pameran dan Penerbitan, Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat dan Penyuluhan Mobile.

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,  
Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pelayanan Informasi;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pelayanan Informasi;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Pelayanan Informasi;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Pelayanan Informasi.

**1) Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan****Tugas Pokok :**

Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan,memberipetunjuk,memberitugas, membimbing,memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan

**Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,  
Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan.

## **2) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat**

### **Tugas Pokok :**

Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat.

### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat ;

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat.

### **3) Seksi Penyuluhan Mobile**

#### **Tugas Pokok :**

Seksi Penyuluhan Mobile dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Penyuluhan Mobile.

#### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan Mobile;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan Mobile;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Penyuluhan Mobile;

- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Penyuluhan Mobile.

#### **4. Kewenangan**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi – fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa memiliki kewenangan – kewenangan meliputi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya;
- c. Pelaksanaan, pembinaan dan pelayanan ketatausahaan, angkutan umum, Pos dan Telekomunikasi;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang meliputi retribusi terminal, parkir, trayek angkutan umum dan pengujian kendaraan bermotor;
- e. Pelaksanaan pembinaan keselamatan berlalu lintas.

#### **5. Visi, Misi dan Tujuan**

##### **a. VISI**

Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa adalah *“Mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Aman, Selamat, Lancar, Tertib, Teratur serta Meningkatnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Handal dan Terpadu yang Menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Gowa”*.

**b. MISI**

Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa yaitu :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sistem informasi dan komunikasi
- b. Meningkatkan penyuluhan tertib lalu lintas
- c. Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi
- d. Peningkatan mutu pengujian kendaraan bermotor
- e. Peningkatan mekanisme sistem angkutan
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**c. TUJUAN**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa menetapkan tujuan berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, setelah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa yaitu :

- a. Terencananya penyelenggaraan perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan, Teknis Operasional, Pos dan Telekomunikasi;

- b. Terwujudnya sistem angkutan umum yang handal, efektif dan efisien;
- c. Terciptanya sistem manajemen transportasi kota/pedesaan;
- d. Terwujudnya keselamatan, keamanan, kemudahan dan kenyamanan dari sistem perhubungan;
- e. Meningkatnya dan terbinanya kerjasama serta kesadaran masyarakat dalam mendukung tertib LLAJ;
- f. Tercapainya target PAD;
- g. Meningkatnya SDM Aparatur Dinas yang profesional;
- h. Tersedianya sarana dan prasarana dibidang perhubungan;
- i. Meningkatnya pelayanan dibidang perhubungan pada masyarakat.

**6. Mekanisme Penetapan Anggaran Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa**

- a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa mengusul ke Bupati Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berbagai pertimbangan dan saran yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD. Antara lain: Realisasi dan Jumlah Angkutan
- b. Bupati menugaskan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (BKDD) untuk mempelajari usulan tersebut.
- c. Bupati mengajukan usulan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa bersama instansi lainnya ke DPRD Kab.Gowa.



- d. DPRD Kab. Gowa mengundang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa dan Instansi lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Gowa untuk membahas anggaran tersebut.
- e. Setelah usulan RKA-SKPD disetujui oleh DPRD Kab. Gowa, kemudian di kirim ke Provensi untuk di pelajari.
- f. Selanjutnya, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gowa dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD).
- g. Kemudian, DPA-SKPD yang di PERDA kan menjadi Target Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa dan instansi lainnya:
  - a) Penerimaan / Pendapatan
  - b) Belanja

## **7. Analisis Deskriptif**

Mekanisme penetapan anggaran selama 5 tahun (2011-2015) Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa melalui laporan keuangannya memperlihatkan terjadinya fluktuasi di setiap retribusi-retribusi Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa. dapat diuraikan, sebagai berikut:

**Tabel 3. Realisasi dan Target Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Terminal	
	Realisasi	Target
2011	Rp 377.490.000,00	Rp 302.072.000,00
2012	Rp 503.477.000,00	Rp 302.072.000,00
2013	Rp 500.550.000,00	Rp 499.300.000,00
2014	Rp 503.400.000,00	Rp 499.300.000,00
2015	Rp 503.200.000,00	Rp 499.300.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

Berdasarkan data pada tabel 3, dapat dilihat bahwa capaian tertinggi retribusi terminal yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp 503.477.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan Peraturan Daerah dimana tarif retribusi terminal di ubah dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000. Adapun penurunan capaian retribusi terminal pada tahun 2013 disebabkan oleh kurangnya angkutan umum yang beroperasi yaitu sebesar 1.464.

**Tabel 4. Realisasi dan Target Retribusi MCK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi MCK	
	Realisasi	Target
2011	-	-
2012	Rp 4.890.000,00	Rp 6.840.000,00
2013	Rp 8.170.000,00	Rp 6.840.000,00
2014	Rp 5.870.000,00	Rp 6.840.000,00
2015	Rp 4.250.000,00	Rp 6.840.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

Data pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa capaian target retribusi Mandi Cuci Kakus (MCK) hanya terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp8.170.000,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut selama 2 minggu di adakan kegiatan (pasar malam) di halaman belakang Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa di dekat lokasi MCK. Adapun faktor tidak tercapainya target retribusi MCK, di akibatkan karena adanya keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa lokasi MCK terlalu jauh dari tempat pemberhentian atau tempat istirahat angkutan daerah.

**Tabel 5. Realisasi dan Target Retribusi Kios Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Kios	
	Realisasi	Target
<b>2011</b>	-	-
<b>2012</b>	Rp 3.300.000,00	Rp 7.500.000,00
<b>2013</b>	Rp 900.000,00	Rp 7.500.000,00
<b>2014</b>	Rp 4.370.000,00	Rp 7.500.000,00
<b>2015</b>	Rp 2.750.000,00	Rp 7.500.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa realisasi tidak pernah mencapai target. Hal ini disebabkan karena dari 25 kios yang tersedia hanya beberapa yang terisi, sementara target dari retribusi kios itu sendiri ditentukan dari jumlah kios (25) dikalikan dengan retribusi kios pertahun yaitu Rp 300.000,00. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya pengawasan yang

mengakibatkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi.

**Tabel 6. Realisasi dan Target Retribusi PKB Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi PKB	
	Realisasi	Target
<b>2011</b>	Rp 235.408.000,00	Rp 227.000.000,00
<b>2012</b>	Rp 246.725.000,00	Rp 227.000.000,00
<b>2013</b>	Rp 258.177.500,00	Rp 227.000.000,00
<b>2014</b>	Rp 250.778.500,00	Rp 227.000.000,00
<b>2015</b>	Rp 242.213.000,00	Rp 227.000.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pada retribusi PKB mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendaraan bermotornya dan membayar pungutan. Kurangnya pengawasan dapat di artikan bahwa rasia pengujian kendaraan bermotor tidak setiap hari di laksanakan, sementara mobil angkutan pedesaan kebanyakan yang sudah tua hingga jarang beroperasi. Jadi pada saat pengawasan di lakukan mobil tersebut tidak beroperasi. Hal tersebut juga bisa berdampak buruk untuk masyarakat kedepannya karena pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menguji keamanan angkutan kendaraan itu sendiri.

**Tabel 7. Realisasi dan Target Retribusi Parkir Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Parkir	
	Realisasi	Target
<b>2011</b>	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00
<b>2012</b>	Rp 81.000.000,00	Rp 60.000.000,00
<b>2013</b>	Rp 81.000.000,00	Rp 80.000.000,00
<b>2014</b>	Rp 95.000.000,00	Rp 80.000.000,00
<b>2015</b>	Rp 99.000.000,00	Rp 90.000.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

Berdasarkan pada tabel 7 di atas, memperlihatkan adanya peningkatan realisasi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya selalu dilakukan survey titik lokasi parkir yang dianggap layak untuk dikenakan pungutan. Adapun titik lokasi parkir yang di anggap layak yaitu dimana tempat atau lokasi tersebut ramai di kunjungi masyarakat dan belum di kenakan retribusi.

**Tabel 8. Realisasi dan Target Pajak Parkir Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Pajak Parkir	
	Realisasi	Target
<b>2011</b>	-	-
<b>2012</b>	-	-
<b>2013</b>	-	-
<b>2014</b>	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
<b>2015</b>	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

Dari data pada tabel 8, dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2014 dan 2015 belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pengenaan retribusi Pajak Parkir dan pengusaha atau perusahaan yang mempunyai lahan parkir untuk dikenakan retribusi Pajak Parkir di Kabupaten Gowa hanya ada 1 (satu) yaitu di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

**Tabel 9. Realisasi dan Target Retribusi Izin Trayek Dinas  
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa  
Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Izin Trayek	
	Realisasi	Target
<b>2011</b>	Rp 12.562.500,00	Rp 21.000.000,00
<b>2012</b>	Rp 17.300.000,00	Rp 21.000.000,00
<b>2013</b>	Rp 19.560.000,00	Rp 24.000.000,00
<b>2014</b>	Rp 17.750.000,00	Rp 24.000.000,00
<b>2015</b>	Rp 14.280.000,00	Rp 14.000.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa (data diolah, 2016)

Berdasarkan tabel 9 di atas, terlihat adanya kecenderungan target yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi. Hal ini disebabkan karena target tersebut dibuat sesuai dengan penggabungan antara izin kir dan izin insidentil, hanya saja izin insidentil sudah dihapuskan sehingga terlihat bahwa realisasi tahun 2011-2014 tidak pernah mencapai target. Selanjutnya dapat kita lihat pada tahun 2015 terjadi penurunan target dikarenakan izin insidentil sudah dihapuskan dari target anggaran, sehingga realisasi pada tahun tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian faktor menurunnya realisasi disebabkan karena meningkatnya kendaraan pribadi, bentor dan mobil rental.

## B. Hasil Analisis Data

### 1. Evaluasi Menggunakan Metode Mengukur Kesalahan Peramalan

Keseluruhan keakuratan beberapa model peramalan-pergerakan rata-rata, penghalusan eksponensial, atau yang lainnya-dapat ditentukan dengan membandingkan nilai yang diramalkan dengan nilai yang aktual atau yang diamati. Jika  $F_t$  menunjukkan peramalan dalam periode  $t$ , dan  $A_t$  menandakan permintaan aktual dalam periode  $t$ , *kesalahan peramalan* (atau deviasi) didefinisikan sebagai berikut.

#### a. Mean Normal Deviation

*Mean Normal Deviation* (MND) adalah pengukuran untuk ketidaktepatan peramalan. MND merupakan rata-rata antara peramalan dengan permintaan normalitas. Semakin kecil nilai MND maka semakin tinggi akurasi dari peramalan (Russel dan Taylor III, 2011, p. 357). Nilai Mean Abslote Deviation dapat dihitung dengan :

$$MND = \frac{\sum | \text{Aktual-Peramalan} |}{n}$$

**Tabel 10. Perhitungan *Mean Normal Deviation* (MND) Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Terminal	
	MND	%
2011	Rp 6.284.833,34	-
2012	Rp 16.783.750,00	167
2013	Rp 104.166,67	-99
2014	Rp 341.666,67	228
2015	Rp 325.000,00	-5

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat penyimpangan terbesar terjadi pada tahun 2012 yang menyebabkan terjadinya peningkatan penyimpangan sebesar 167% dari tahun sebelumnya. Terjadinya penyimpangan ini disebabkan oleh realisasi yang melebihi target. Hal ini berarti pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Bahkan melampaui target yang direncanakan.

**Tabel 11. Perhitungan *Mean Normal Deviation* (MND) Retribusi MCK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi MCK	
	MND	%
2011	-	-
2012	Rp (162.500,00)	-
2013	Rp 110.833,33	168
2014	Rp (80.833,33)	-173
2015	Rp (215.833,33)	-167

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016



Berdasarkan data pada tabel 11 di atas, menunjukkan penyimpangan positif berada pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut di adakan kegiatan (pasar malam) selama 2 minggu dimana pada tahun sebelumnya tidak pernah di adakan kegiatan tersebut. Adapun penyimpangan negatif dari target yang terjadi disebabkan karena target yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai pada tahun selanjutnya, namun target yang ditetapkan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel 12. Perhitungan *Mean Normal Deviation* (MND) Retribusi Kios Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Kios	
	MND	%
2011	-	-
2012	Rp (350.000,00)	-
2013	Rp (550.000,00)	57
2014	Rp (260.833,33)	147
2015	Rp (395.833,33)	52

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 12, memperlihatkan bahwa retribusi kios mengalami penyimpangan negatif selama 4 tahun terakhir (2012-2015). Penyimpangan ini terjadi disebabkan oleh dari 25 kios yang berada di area Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa hanya 8 kios yang terisi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 13. Perhitungan *Mean Normal Deviation* (MND) Retribusi PKB Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi PKB	
	MND	%
2011	Rp 700.666,67	-
2012	Rp 1.643.750,00	135
2013	Rp 2.598.125,00	58
2014	Rp 1.981.541,67	-24
2015	Rp 1.267.750,00	-36

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 13 di atas, dapat dilihat bahwa penyimpangan terendah berada pada tahun 2011. Terjadinya penyimpangan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengadakan rasia Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengujikan kendaraan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 6.

**Tabel 14. Perhitungan *Mean Normal Deviation* (MND) Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Parkir	
	MND	%
2011	-	-
2012	Rp 1.750.000,00	-
2013	Rp 83.333,33	-95
2014	Rp 1.250.000,00	1.400
2015	Rp 750.000,00	-40

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan tabel 14 diatas, menunjukkan tingkat penyimpangan tertinggi berada pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena bertambahnya titik lokasi parkir setiap tahunnya.

**Tabel 15. Perhitungan *Mean Normal Deviation* (MND) Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Izin Trayek	
	MND	%
2011	Rp (703.125,00)	-
2012	Rp (308.333,33)	-56
2013	Rp (370.000,00)	20
2014	Rp (520.833,33)	41
2015	Rp 23.333,33	-104

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 15, dapat dilihat bahwa tingkat penyimpangan positif berada pada tahun 2015. Penyimpangan ini terjadi karena dihapuskannya pungutan untuk izin insidental dari perhitungan target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 9

b. Mean Absolute Percen Error

*Mean Absolute Percen Error* (MAPE) adalah pengukuran untuk ketidaktepatan peramalan yang menghitung persentase kesalahan dari peramalan. Nilai Mean Absolut Percen Error dapat dihitung dengan :

$$MAPE = \frac{\sum_{i=1}^n 100 \left| \frac{Aktual_i - Peramalan_i}{Aktual_i} \right|}{n}$$

**Tabel 16. Perhitungan *Mean Absolut Percen Error* (MAPE) Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Terminal</b>	
	<b>Interval MAPE</b>	<b>Ukuran Evaluasi</b>
<b>2011</b>	<b>20%</b>	Berhasil
<b>2012</b>	<b>40%</b>	Berhasil
<b>2013</b>	<b>0%</b>	Berhasil
<b>2014</b>	<b>1%</b>	Berhasil
<b>2015</b>	<b>1%</b>	Berhasil

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 16 di atas, dari 5 tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan ukuran evaluasinya dianggap berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Artinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa mampu mengoptimalkan sumber daya pada retribusi terminal dengan baik.

**Tabel 17. Perhitungan *Mean Absolut Percen Error* (MAPE) Retribusi MCK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi MCK</b>	
	<b>Interval MAPE</b>	<b>Ukuran Evaluasi</b>
<b>2011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2012</b>	<b>20%</b>	Berhasil
<b>2013</b>	<b>16%</b>	Berhasil
<b>2014</b>	<b>17%</b>	Berhasil
<b>2015</b>	<b>-36%</b>	Gagal

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 17 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012-2014 ukuran evaluasi pada retribusi MCK dianggap berhasil dalam mncapai dan mengelola sumber daya yang ada. Sementara pada tahun 2015 pencapaiannya dianggap gagal disebabkan karena jangkauan MCK jauh dari jangkauan masyarakat.

**Tabel 18. Perhitungan *Mean Absolut Percen Error* (MAPE) Retribusi Kios Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Kios	
	Interval MAPE	Ukuran Evaluasi
2011	-	-
2012	-32%	Gagal
2013	-122%	Gagal
2014	-6%	Gagal
2015	-72%	Gagal

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 18 diatas, menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir (2012-2015) pencapaiannya dianggap gagal mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini berarti Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa tidak mampu mengoptimalkan sumber daya pada retribusi Kios.

**Tabel 19. Perhitungan *Mean Absolut Percen Error* (MAPE) Retribusi PKB Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi PKB	
	Interval MAPE	Ukuran Evaluasi
2011	4%	Berhasil
2012	8%	Berhasil
2013	12%	Berhasil
2014	10%	Berhasil
2015	6%	Berhasil

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 19 di atas, menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2011-2015) pencapaiannya berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Artinya Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa mampu mengoptimalkan sumber daya pada retribusi PKB dengan sangat baik.

**Tabel 20. Perhitungan *Mean Absolut Percen Error* (MAPE) Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Parkir	
	Interval MAPE	Ukuran Evaluasi
2011	20%	Berhasil
2012	26%	Berhasil
2013	1%	Berhasil
2014	16%	Berhasil
2015	9%	Berhasil

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 20 diatas, menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2011-2015) pencapaiannya dianggap berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Artinya Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa mampu mengoptimalkan sumber daya pada retribusi Parkir dengan sangat baik.

**Tabel 21. Perhitungan *Mean Absolut Percen Error* (MAPE) Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015**

Tahun	Retribusi Izin Trayek	
	Interval MAPE	Ukuran Evaluasi
<b>2011</b>	<b>-45%</b>	Gagal
<b>P2012</b>	<b>-21%</b>	Gagal
<b>2013</b>	<b>-34%</b>	Gagal
<b>2014</b>	<b>-35%</b>	Gagal
<b>2015</b>	<b>2%</b>	Berhasil

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan data pada tabel 21 di atas, menunjukkan bahwa pencapaian selama 4 tahun terakhir (2011-2014) dianggap gagal mencapai target yang telah ditentukan. Sementara pada tahun 2015 berhasil mencapai target. Artinya Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa kurang mampu mengoptimalkan sumber daya pada retribusi Izin Trayek.

Secara umum penyimpangan Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan hasil yang positif. Dimana dari 6 penyimpangan retribusi yang diolah, ada 2 penyimpangan retribusi yang dianggap gagal dan 4 retribusi yang dianggap berhasil. Penyimpangan negatif atau gagal terdapat pada retribusi kios dan izin trayek, penyimpangan negatif ini secara umum terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan atau retribusi. Selanjutnya penyimpangan positif atau berhasil secara umum terjadi karena ditingkatkannya pengawasan pada setiap retribusi. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 22 dibawah ini.





### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Gowa selama 5 tahun terakhir (2011-2015) mengalami fluktuasi. Realisasi pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena izin kir pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor hanya ada di Kabupaten Gowa dan di beberapa daerah tertentu. Selain itu, juga disebabkan karena masih diberlakukannya izin insidentil untuk pemilik mobil rental. Namun, pada tahun 2015 mengalami penurunan yang disebabkan karena meningkatnya kendaraan pribadi, bentor dan mobil rental.

Penyimpangan yang terjadi pada pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir (2011-2015) dapat dikatakan berhasil karena hanya 2 (dua) dari 6 (enam) penyimpangan retribusi (retribusi terminal, retribusi mck, retribusi kios, retribusi pkb, retribusi parkir dan retribusi izin trayek) yang diolah dinyatakan gagal. Penyimpangan negatif atau gagal terdapat pada retribusi kios dan izin trayek. Sedangkan penyimpangan positif atau berhasil terdapat pada retribusi terminal, MCK, PKB dan parkir.

Penyimpangan negatif yang terjadi pada retribusi kios disebabkan karena Kios yang di targetkan untuk dipakai, tidak semuanya digunakan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target yang ditentukan. Terjadinya hal tersebut karena target itu sendiri ditentukan dari jumlah kios dikalikan dengan harga sewa kios pertahunnya. Sedangkan penyimpangan yang terjadi pada retribusi izin trayek disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pungutan dan kurangnya pengawasan pemerintah.

Penyimpangan positif atau berhasil pada retribusi terminal disebabkan karena adanya perubahan Peraturan Daerah dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000. Kemudian Penyimpangan positif yang terjadi pada retribusi MCK (mandi, cuci, kakus) disebabkan oleh pada tahun 2013 sedang diadakan kegiatan (pasar malam) di halaman belakang Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa didekat lokasi MCK. Prioritas pada retribusi PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) terjadinya penyimpangan positif atau berhasil disebabkan karena kendaraan dari luar kabupaten gowa yang melakukan numpang uji atau uji kendaraan di kabupaten gowa, selain itu juga karena ditingkatkannya pengawasan atau rasia kendaraan. Selanjutnya penyimpangan positif atau berhasil pada retribusi parkir terjadi karena setiap tahunnya diadakan survey penambahan titik lokasi yang dikenakan retribusi parkir. Ini berarti bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa mampu mengoptimalkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki pada setiap retribusi pendapatan asli daerah (PAD) dengan baik namun masih perlu di optimalkan.

Setelah mengevaluasi sumber daya yang dimiliki, optimalisasi pendapatan asli daerah juga perlu dilakukan guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Gowa untuk mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah yaitu melakukan penegakan peraturan terkait serta pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pengawasan terkait dengan retribusi-retribusi pendapatan asli daerah, membuat kebijakan daerah yang tidak memberatkan bagi para pelaku usaha dengan mempertimbangkan biaya retribusi atau waktu

pemungutan retribusi secara bijak. Kemudian penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi agar masyarakat dapat lebih taat untuk membayar retribusi-retribusi daerah. Serta meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan retribusi-retribusi daerah guna memudahkan masyarakat dalam membayar iuran retribusi daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2015 menunjukkan hasil yang positif, yang berarti Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa telah mampu mengelola sumber daya – sumber daya yang dimiliki dengan baik.

Secara khusus, pendapatan asli daerah yang menunjukkan hasil yang positif terdapat pada retribusi terminal, retribusi PKB dan retribusi parkir. Sementara pendapatan asli daerah yang menunjukkan hasil yang negatif terdapat pada retribusi kios dan izin trayek. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, peneliti dapat memberikan saran antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa perlu mengadaakan dan mempertegas seperangkat kebijakan mengenai penertipan sistem terminal, dimana agar penumpang atau angkutan daerah harus mengambil muatan di dalam terminal.

2. Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa harus meningkatkan pengawasan, khususnya pada retribusi izin trayek agar masyarakat lebih taat dalam membayar retribusi.
3. Sehubungan dengan retribusi Mandi Cuci Kakus (MCK), Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa perlu mengadakan papan informasi yang lebih jelas dan perlu memperbaiki serta menambah jumlah Wc/MCK.
4. Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa harus mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gitosudarmo dan Najmudin. 2008. *Teknik Proyeksi Bisnis*. BPFE. Yogyakarta
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Heizer dan Render. 2014. *Manajemen Operasi*. Salemba Empat
- <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi III)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa. 2016. *Laporan Penerimaan / Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa*. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
- Munandar. 2015. *Budgeting*. BPFE. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2011. *Retribusi Terminal*. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2012. *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2012. *Retribusi Tempat Khusus Parkir*. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2012. *Pajak Parkir*. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2012. *Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan*. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.

- Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2011. *Retribusi Izin Trayek*. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. *Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. *Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Sumber Pendapatan Asli Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wirwan B. Ilyas dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.



L

A

M

P

l

R

A

N